

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara sumber alam yang ada. Organisasi Greenpeace salah satu sarana yang baik untuk setiap orang bila ingin menjadi sukarelawan dalam mencegah maupun menangani setiap kerusakan lingkungan khususnya pembakaran hutan. Greenpeace telah berhasil ikut serta dalam mengurangi kebakartan hutan di Indonesia dimana pada tahun 2015 kebakaran hutan menghabiskan lahan sekitar 2,6 juta hektar. Pada 2016 jumlah kebakaran hutan berkurang 94% menjadi 146 ribu hectare, ini merupakan penurunan kebakaran hutan yang sangat drastis. Pada tahun 2017 ada juga penurunan kebakaran sebesar 15% menjadi sekitar 125 ribu hektar. Penurunan kebakaran ini menunjukkan bahwa adanya usaha yang dilakukan untuk mengurangi fenomena kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

Peran kerjasama antara Indonesia dengan organisasi greenpeace dalam menangani kasus kebakaran hutan di Indonesia melalui kampanye maupun program Greenpeace memiliki dampak yang baik sehingga berhasil mengurangi angka kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan Greenpeace seperti kampanye, lalu membentuk peta yang sudah didigitalisasi serta melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun NGO bukanlah semata-mata hanya untuk sementara namun sampai seterusnya. Sehingga lingkungan yang ada saat ini bukan saja akan dinikmati oleh kita, namun anak cucu kita.

Greenpeace sebagai organisasi kategori NGO memiliki peranan yang penting dalam mengupayakan permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Greenpeace masuk ke setiap negara – negara yang diidentifikasi memiliki permasalahan lingkungan hidup dan melalauai pemahaman atau prespektif konstruktivis yang memandang bahwa negara bukanlah satu – satunya aktor dalam Hubungan Internasional seperti pandangan Realis, sebab banyak organisasi non – governmental yang juga bergerak dalam isu – isu lingkungan. Sesuai dengan Green Theory, Greenpeace memiliki komunitas yang lebih kecil yaitu kelompok lokal dimana kelompok ini bertugas sebagai komunitas di daerah yang berada jauh dari kantor

Greenpeace untuk menyuarkan kampanye-kampanye Greenpeace sehingga kegiatan Greenpeace tidak hanya berada di lingkungan Jakarta saja tapi dapat sampai ke daerah-daerah lain di Indonesia. Greenpeace juga berpihak pada masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal dimana Greenpeace mendorong para pengusaha kelapa sawit untuk menyejahterahkan para petani sawit dengan memberikan harga yang pantas pada sawit yang di beli.

Greenpeace melakukan pendekatan terhadap masyarakat karena masyarakat memiliki peran yang penting untuk mendukung keberhasilan dari program atau kampanye yang dilakukan. Masyarakat sebagai konsumen diberikan edukasi agar lebih sadar dengan bahaya lingkungan yang ada dan Greenpeace juga mendesak pemerintah untuk membuat perubahan kebijakan sesuai dengan konsep advokasi. Maka dari itu Greenpeace harus dibantu oleh kepedulian oleh masyarakat dan perusahaan – perusahaan yang berkaitan dengan hutan agar terciptanya hutan yang asri tanpa adanya pembakaran yang diakibatkan oleh kesengajaan manusia maupun kebakaran hutan yang terjadi karena alam seperti musim kemarau,serta greenpeace akan selalu berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat – masyarakat di dunia agar masyarakat paham penting nya hutan dan efek – efek yang diakibatkan adanya kebakaran hutan serta peranan pemerintah untuk membantu program – program Greenpeace dalam peranan Greenpeace menanggulangi kebakaran hutan.

5.2 SARAN

Keterbukaan adalah hal wajib untuk melihat kemajuan yang dilakukan oleh lembaga - lembaga. Hal ini disebabkan jika mereka mengenalkan hasil laporan – laporan kemajuannya, masyarakat ataupun kelompok yang memperhatikan lingkungan yang dapat memantau pencapaian atas pelaksanaan komitmen terhadap nol deforestasi. Sehingga, dorongan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen, NGO, serta kelompok bisnis mampu membuat perubahan politik karena solusi jangka panjang untuk melindungi hutan yaitu dengan hukum dan kebijakan.

Kampanye yang dilayangkan kepada pemerintah dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan supaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berguna melindungi hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Mengeluarkan produk hukum yang kuat diharapkan akan mampu untuk melindungi hutan Indonesia yang mengalami kerusakan tiap tahunnya melalui perbaikan tata kelola hutan. Selain itu, produk hukum tersebut juga diharapkan dapat menjamin perlindungan kepada hak-hak yang dimiliki masyarakat adat maupun masyarakat lokal disekitar lokasi hutan, agar secara bersama-sama bisa ikut melindungi hutan dan membantu dalam menghentikan pengerusakan hutan dan lahan Indonesia.